

Ekses Banjir, BPBD Pidie Usulkan Penguatan Tebing Sungai di Gajah Aye

Senilai Rp 1,2 M



Ir Dewan Ansari, Kepala BPBD Pidie

SERAMBINNEWS.COM, SIGLI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie mengusulkan dana Rp 1,2 miliar untuk penguatan tebing sungai di Gajah Aye, Pidie. Langkah ini sebagai upaya salah satunya mencegah bencana banjir sering melanda sebagian wilayah Kota Sigli, Kecamatan Pidie hingga Indra Jaya. Penguatan tebing sungai ini akan dikerjakan pada tahun 2021.

Selain itu, menurut Kepala BPBD Pidie, penyebab banjir yang terjadi pada Senin (14/12/2020) lalu karena terapungnya rumpun bambu di sungai. "Kami sudah menuntaskan petugas membersihkan rumpun bambu di Kecamatan Indra Jaya meliputi Gampong Ulee Tutu Raya, Klibuet dan Kecamatan Pidie Gampong Lhok Keutapang," ujar Kepala Pelaksana BPBD Pidie, Ir Dewan Ansari, Rabu (6/1/2021). Ada tiga titik adanya rumpun bambu jatuh ke sungai di sepanjang aliaran itu.

Menurut Dewan Ansari, penguatan tebing sungai di Gajah Aye itu akan dilakukan sepanjang 90 Meter sekira Rp 1,2 Miliar dari dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) APBK 2021. Selanjutnya, pihaknya juga akan melakukan penanganan tebing sungai dan badan jalan di Gampong Tumpung Laweung, Kecamatan Pidie sepanjang 45 meter gunakan anggaran sekira Rp 500 juta.

Sementara itu ada juga kebutuhan penanganan kerusakan di Kembang Tanjung, Glumpang Tiga, Tangse, Mutiara. "Kita akan melihat ketersediaan anggaran untuk mengatasinya. Kalau yang prioritas kita akan lakukan dulu di Gajah Aye dan Tumpok Laweung, " katanya. Selain ini, dari dana daerah BPBD akan mengusul ke pusat untuk rehab dan rekon tebing sungai termasuk abrasi

pantai di Geunteeng. "Untuk di Geunteeng yang darurat sudah dibangun dan yang kita usulkan adalah yang permanen," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan rumah di Gampong Dayah Tutong, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Senin (14/12/2020), masih terendam banjir. Banjir terjadi terjadi pada, Senin (14/12/2020) sekira pukul 03.00 WIB, dini hari, akibat meluapnya Krueng Baro yang membentang dari Tangse hingga ke Sigli. Banjir merendam puluhan desa di sepanjang aliran sungai Krueng Baro, mulai dari Mila, Indrajaya, Delima, hingga Kecamatan Pidie, dan Kota Sigli. Selain Dayah Tutong yang masih terendam banjir, empat gampong di Kecamatan Pidie juga sempat dilintasi banjir, yakni Lhok Keutapang, Paloh, Gampong Barat, dan Gajah Aye. "Banjir yang menggenangi rumah warga di empat gampong itu hanya beberapa menit saat terjadi luapan air Krueng Baro. Air luapan itu sempat masuk ke rumah warga, saat ini telah surut," kata Camat Pidie, Miswar SSos MM, kepada Serambinews.com, Senin (14/12/2020). Warga berdiri di dalam genangan air di halaman rumah warga di Gampong Dayah Muara Garot, Kecamatan Indrajaya, Pidie, Senin (14/12/2020). Menurutnya, dari jumlah gampong yang berdampak banjir luapan, hanya Gampong Dayah Tutong yang lebih parah digenangi banjir. Warga di gampong itu telah memasang satu tenda untuk memasak, karena sebagian pemilik rumah tidak bisa memasak. Sebut Miswar, banjir luapan belum surut akibat saluran pembuang kecil. Sehingga harus diturunkan mobil pemadam kebakaran untuk menyedot air. "Pukul 10.00 WIB, mobil pemadam telah bekerja menyedot air sehingga air yang menggenangi Gampong Dayah Tutong telah surut," jelasnya. Sementara itu, sejumlah warga Gampong Aree, Kecamatan Delima juga mengabarkan banjir merendam sejumlah desa di kemukiman padat penduduk tersebut.

"Di beberapa titik ketinggian air mencapai 1 meter. Seingat kami ini seperti kejadian tahun 1976 lalu. Ada laporan beberapa rumah di Meunasah Keureumbok masih terendam," kata Aisyaturradhiah M Nur, pengurus Yayasan Ummi Gampong Aree, dalam pesan WhatsApp kepada Serambinews.com, Senin (14/12/2020). Catatan Serambinews.com, daerah di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Krueng Baro, pernah beberapa kali dilanda banjir besar. Krueng Baro yang merupakan sub dari DAS Krueng Beungga yang berada di hulu, pernah mengalami empat kali banjir bandang, yaitu pada tahun 1976, 1990, 2011, dan terakhir di tahun 2016.

Sumber :

Rabu, 6 Januari 2021 13:48, <https://aceh.tribunnews.com/2021/01/06/ekses-banjir-bpbd-pidie-usulkan-penguatan-tebing-sungai-di-gajah-aye-senilai-rp-12-m?page=3>.

Catatan :

1. Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1) Pasal 37 menyatakan bahwa Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - 1) belanja pegawai; 15
 - 2) bunga;
 - 3) subsidi;
 - 4) hibah;
 - 5) bantuan sosial;
 - 6) belanja bagi basil;
 - 7) bantuan keuangan; dan
 - 8) belanja tidak terduga.
 - 2) Pasal 48
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan buktibukti yang sah.

3) Pasal 162

- a. Ayat (3) menyatakan bahwa Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- b. Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- c. Ayat (5) menyatakan bahwa Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak 40 yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.